Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 5 No. 1 Oktober 2016

ISSN **: 2503-4413,** Hal 11 - 22

**ANALISIS PENENTUAN INDUSTRI PRIORITAS KABUPATEN BLORA**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**Medi Nopiana**

**Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singaperbangsa Karawang**

**Email: medinopiana@gmail.com**

**Agus Maulana**

 **Dosen Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor**

**Email: agus.maulana0508@gmail.com**

***Abstraksi***

Penelitian ini membahas tentang identifikasi terhadap industri potensial yang layak untuk dikembangkan menjadi industri prioritas di Kabupaten Blora.Metode analisis data menggunakan analisis descriptif, dengan empat metode pengumpulan data, yaitu studi literatur, *Focus Group Discussion* (FGD), observasi lapangan dan diskusi *expert*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan industri prioritas terpilih yang layak dikembangkan di Kabupaten Blora adalah industri kerajinan dan furnitur berbasis (kayu) jati.Hal ini didasarkan pada berbagai kriteria, yaitu memiliki nilai tambah tinggi, memiliki keunikan daerah, memiliki keterkaitan yang kuat dengan sumber daya yang dimiliki daerah, serta memiliki peluang menembus pasar internasional.

Kata kunci : Industri Prioritas, Daya Saing, Kabupaten Blora

***Abstract***

*This research discusses identification of potentially viable industries to be developed as a priority industry in Regency of Blora. Methods of data analysis used is descriptive analysis, with four data collection methods, namely desk study, Focus Group Discussion (FGD), field observations and expert discussions. The data used are primary and secondary data. The results of analysis show that the industry elected as a priority industryin Regency of Blora arethose which are based on crafts and furniture (teak wood). This is due to the fact that the industry have high added-value products, unique in the region, have strong links to resources owned by the region, as well as having the opportunities to penetrate the international market.*

*Keywords: Priority Industry, Competitiveness,Regency of Blora.*

**PENDAHULUAN**

Globalisasi ekonomi yang berlangsung saat inimenuntut terjadinya persaingan/kompetisi antarnegara.Hal tersebut mendorongsetiap negara berupaya untuk menyusun daya saing bangsanya.Paradigma yang berkembang dewasa iniadalah daya saing nasional yang bertumpu pada daya saing daerah.

Daya saing daerah bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan mengembangkan sektor unggulan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Daya saing daerah menciptakan keunggulan kompetitif, yang lebih mengarah pada upaya suatu daerah menggunakan berbagai keunggalannya untuk bersaing dengan daerah lain.Sesuai Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu adanya upaya memacu kreativitas daerah untuk meningkatkan daya saing daerah.

Salah satu daerah yang memiliki potensi besarterutama dalam hal kekayaan sumber daya alam, yaitu Kabupaten Blora di Provinsi Jawa Tengah.Selain sebagai salah satu daerah yang memiliki lapangan minyak dan gas terbesar di Indonesia, Kabupaten Bloramerupakankabupaten dengan jumlah ternak besar terbanyak di Provinsi Jawa Tengah, utamanya ternak sapi potong.Kabupaten Blora juga sejak dulu sudah dikenal sebagai salah satu penghasil kayu jati dengan kualitas terbaik.Besarnya potensi tersebut harus didukung oleh peranan sektor industri pengolahan, sehingga menghasilkan nilai tambah yang tinggi, terbukanya lapangan kerja dan meningkatnya daya saing daerah.Dengan banyaknya industri potensial yang ada di Kabupaten Blora, diperlukan penelitian untuk menentukan prioritas terhadap industri yang layak untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah tersebut.

Penelitian ini bertujuan sebagai bentuk informasi bagi para pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, lembaga keuangan, dunia usaha maupun masyarakat luas yang berkepentingan dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).Pembahasan penelitian ini mencakup identifikasi terhadap industri potensial yang layak untuk dikembangkan menjadi industri prioritas di Kabupaten Blora.Penelitian ini juga membatasi penentuan industri prioritas pada UMKM.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Konsep Daya Saing**

Secara umum, daya saing adalah kemampuan meningkatkan posisi tawar dalam memaksimalkan tujuan. Konsepsi daya saing memang bisa diekspresikan dengan cara berbeda. Menurut Bank Dunia sebagaimana dinyatakan oleh Daryanto dan Hafizrianda (2010), daya saing mengacu pada besaran serta laju perubahan nilai tambah perunit input yang dicapai oleh perusahaan. Daya saing karenanya, tidak hanya sebatas tingkat efisiensi suatu perusahaan (mikro) tetapi mencakup aspek di luar perusahaan seperti iklim berusaha yang sesungguhnya faktor di luar kendali perusahaan.

Menurut Hitt, Ireland dan Hoskisson (2001), keunggulan persaingan bertahan atau dapat dipertahankan muncul ketika sebuah perusahaan mampu menerapkan strategi penciptaan nilai yang tidak dapat ditiru manfaatnya oeh perusahaan lain atau terlalu tinggi biaya untuk menirunya. Hakikat fundamental persaingan di kebanyakan dunia Industri sedang berubah.Daya saing sebuah perusahaan dicapai melalui akumulasi daya saing individual perusahaan dalam ekonomi global.Karenanya, perusahaan dan bahkan suatu distrik/*region*, hingga negara harus melihat dunia sebagai pasarnya.Dalam menghadapi persaingan, kompetensi, dan kapabilitas, serta aset strategis merupakan sumber keunggulan daya saing berkelanjutan.Hitt et al. menyatakan bahwa kondisi-kondisi dalam lingkungan persaingan meningkatkan persaingan dan membuat banyak perusahaan harus bersaing dengan cara-cara berbeda untuk mencapai daya saing strategis dan menghasilkan laba di atas rata-rata.Lingkungan persaingan ini mengalami perubahan dengan peserta baru yang mentransformasi industri dan seringkali menggunakan teknologi baru.Dinamika persaingan dihasilkan oleh serangkaian tindakan kompetitif dan tanggapan kompetitif di antara perusahaan-perusahaan yagn bersaing dalam satu industri tertentu.

*Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan daya saing sebagai tingkat kemampuan suatu negara menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan tuntutan pasar internasional dan bersamaan dengan itu kemampuan menciptakan suatu kesejahteraan berkelanjutan bagi warganya. Pada tingkat wilayah, di dalam suatu negara sebagaimana didefinisikan oleh kementerian perdagangan, daya saing adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik dan internasional. Secara umum, daya saing adalah kemampuan meningkatkan posisi tawar dalam memaksimalkan tujuan.Daya saing produk dapat diartikan sebagai kemampuan produk tersebut menarik konsumen/pengguna untuk mengeluarkan dananya untuk membeli produk yang dihasilkan.

Mengingat daya saing suatu produk selalu dibandingkan dengan daya saing produk sejenis atau produk substitusi dari perusahaan atau negara lain, maka peningkatan daya saing menjadi tugas mutlak perusahaan atau negara. Dengan demikian maka pengembangan teknologi perlu dilakukan. Pengembangan teknologi yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pengembangan usaha. Artinya, bahwa basis pengembangan industri yang dirancang agar memiliki daya saing secara berkelanjutan adalah teknologi. Dengan basis teknologi yang kuat akan meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk, yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan usaha yang dilakukan. Pemikiran demikian menjadi landasan kenapa industri, termasuk agroindustri menjadi penting dikembangkan atas basis teknologi.

**Penentuan Industri Prioritas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035**

Penetapan industri prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Kepentingan nasional sebagai tujuan pembangunan industri diantaranya adalah:

1. peningkatan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan ekonomi dari negara lain;
2. keamanan, kesatuan, dan konektivitas wilayah Indonesia secara strategis; dan
3. persebaran kegiatan ekonomi dan industri secara lebih merata ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Permasalahan terkait pertumbuhan ekonomi yang dihadapi di antaranya adalah:

1. penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penciptaan lapangan kerja produktif; dan
2. struktur industri yang lemah yang ditandai dengan kurangnya keterkaitan antara satu sektor industri dengan industri lainnya, tingginya kandungan impor bahan baku dan komponen, dan lemahnya daya saing di pasar global.

3. Keinginan untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju dilakukan melalui peningkatan produktivitas yang dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi yang sesuai.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dirumuskan kriteria penentuan industri prioritas sebagai berikut :

1. Kriteria secara kuantitatif terdiri dari :

1. memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor, atau memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri;
2. meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja, atau berpotensi dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif;
3. memiliki daya saing internasional, atau memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing di pasar global;
4. memberikan nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam negeri, atau memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian;
5. memperkuat, memperdalam, dan menyehatkan struktur industri; dan
6. memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi.

2. Kriteria secara kualitatif terdiri dari:

1. memperkokoh konektivitas ekonomi nasional;
2. menopang ketahanan pangan, kesehatan dan energi; dan
3. mendorong penyebaran dan pemerataan industri.

**METODE PENELITIAN**

Penentuan komoditas unggulan daerah Kabupaten Blora dilakukan dengan metode analisis deskriptif, melalui empat metode pengumpulan data, yaitu studi literatur, FGD, observasi lapangan dan diskusi *expert*.Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer bersumber dari data atau informasi yang diperoleh dari hasil observasi lapangan melalui proses dialog intensif dengan para pelaku usaha yang menghasilkan komoditas potensial. Selain itu, data primer diperoleh dari hasil kegiatan FGD dan diskusi *expert* dengan beberapa pemangku kepentingan yang terpilih terkait dengan informasi yang perlu pendalaman. Sedangkan, data sekunder bersumber dari Kabupaten Blora dalam Angka dari Badan Pusat Statistik (BPS), Laporan Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (PSIPD) Kabupaten Blora, Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Tengah dari Bank Indonesia.

**HASIL DAN ANALISIS**

Berdasarkan penelitian awal yang bersumber dari data sekunderdiperoleh dua industri potensial di Kabupaten Blora. Yakni, industri berbasis sapi potong dan industri kerajinan dan furnitur dari kayu (jati) berbasis tegakan, akar, limbah, dan kayu daur-ulang atau*recycle* (yaitu kayu jati hasil bongkaran rumah dan bangunan lainnya). Hal ini didasarkan pada berbagai kriteria, yaitu memiliki nilai tambah tinggi, memiliki keunikan daerah, memiliki keterkaitan yang kuat dengan sumber daya yang dimiliki daerah, serta memiliki peluang menembus pasar internasional.

Sebelum menyelenggarakan FGD dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Blora, terlebih dahulu melakukan diskusi hasil kajian awal dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinperindagkop dan UMKM) Kabupaten Blora, dalam hal ini dengan Kepala Bidang Perindustrian beserta staf. Diskusi inibanyak membahas tentang perkembangan industri-industri yang menghasilkan komoditas potensial di atas.Terciptanya suatu komoditas unggulan daerah tidak terlepas dari perkembangan pembangunan industri di wilayah tersebut.

Dalam diskusi tersebut diketahui bahwa industri berbasis sapi potong di wilayah Kabupaten Blora dapat dikatakan belum dikembangkan secara masif. Di sisi lain sesuai data BPS tahun 2016, Kabupaten Blora memang merupakan kawasan yang memiliki populasi sapi potong terbesar di Jawa Tengah. Yakni mencapai 211.559 ekor, atau hampir mencapai 13% dari total populasi sapi potong di Jawa Tengah sebesar 1.642.578 ekor.

Komoditas sapi potong tersebut sebagian dijual dalam keadaan hidup ke luar wilayah Kabupaten Blora, dan belum ada aktivitas yang mengarah pada pengembangan industri berbasis sapi potong.Apalagi, peternakan sapi potong di wilayah kabupaten ini belum dilakukan secara terpusat, artinya peternakan sapi potong masih diusahakan oleh rakyat secara terpisah-pisah. Apabila industri berbasis sapi potong ingin dikembangkan, dibutuhkan stimulus awal yang sangat besar, baik dari aspek permodalan (dana), infrastruktur, maupun ketersediaan teknologi dan sumber daya manusia yang memang pada saat ini tidak dimiliki Kabupaten Blora.

Lebih lanjut, diskusi awal dengan Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Blora menemukan bahwa industri kerajinan ukiran dan furnitur dari kayu (jati) berbasis tegakan, akar, limbah dan kayu daur-ulang sudah cukup berkembang di Blora, khususnyaindustri berbasis tunggak (akar) jati. Namun demikian industri ini banyak menghadapi masalah, khususnya persaingan dengan industri ukir Jepara (yang menggunakan bahan baku tegakan jati dari Kabupaten Blora) serta persoalan ketersediaan bahan baku yang sangat tergantung pada pasokan dari Perhutani. Belum lagi masalah pemberlakuan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terhadap bahan baku jati mulai tahun 2014. Dari diskusi tersebut, tampaknya terdapat kecenderungan dari Pemerintah Kabupaten Blora untuk mengembangkan industri berbasis kayu jati, khususnya akar jati.Penekanan pada kata, khususnya akar jati, menunjukkan keengganan Blora untuk bersaing secara frontal dengan Kabupaten Jepara yang sudah lebih dulu dikenal dengan produk mebel ukir jati.Verifikasi data sekunder yang dilakukan dalam diskusi awal tersebut, memang menunjukkan bahwa pada dasarnya Kabupaten Blora memiliki potensi untuk mengembangkan komoditas-komoditas yang dihasilkan industri sapi potong dan industri berbasis jati, meskipun kedua industri itu menghadapi permasalahan sendiri-sendiri.

Hasil diskusi awal ini selanjutnya dibawa ke Kepala Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Blora untuk mendapatkan pencerahan. Hasil diskusi dengan kepala dinas tersebut mengungkapkan bahwa memang industri berbasis sapi potong memiliki potensi untuk dikembangkan.Akan tetapi dari kondisi yang ada saat ini, pembangunan industri berbasis sapi potong masih terlalu dini untuk dilakukan. Di pihak lain, industri berbasis kayu jati, khususnya akar jati sudah mulai berkembang di wilayah Kabupaten Blora.Meskipun untuk industri berbasis batang (tegakan) kayu jati Kabupaten Blora masih berada di bawah bayang-bayang industri ukir jati dari Kabupaten Jepara, yang sesungguhnya mendapatkan bahan bakunya dari Blora.

Pihak Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Blora berpendapat bahwa pengembangan industri berbasis kayu jati di Blora merupakan tantangan yang layak ditangani secara sungguh-sungguh dan berpotensi memberikan kontribusi yang besar bagi Kabupaten Blora.Diskusi ini menyepakati untuk menyodorkan industri kerajinan ukiran dan furnitur dari kayu (jati) berbasis tegakan, akar, limbah dan kayu daur-ulang untuk dibahas dalam FGD, namun tetap menyediakan alternatif industri berbasis sapi potong.Hal ini dilakukan untuk membuka kemungkinan adanya pandangan yang berkembang dalam FGD.Berikut ini pembahasan secara mendalam mengenai berbagai potensi industri yang menghasilkan komoditas potensial di Kabupaten Blora.

**Potensi Industri berbasis Sapi Potong**

Potensi peternakan di wilayah Kabupaten Blora cukup besar sejak beberapa tahun silam.Wilayah ini cukup dikenal sebagai daerah sentra pengembangan peternakan sapi potong. Namun demikian industri berbasis sapi potong di wilayah Kabupaten Blora dapat dikatakan belum sama sekali berkembang. Saat ini, hanya terdapat peternakan sapi tradisional, yang diusahakan oleh masyarakat baik secara komunal maupun individual. Populasi sapi potong pada tahun 2015 di kabupaten ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yakni berjumlah 199.584 ekor pada tahun 2014 dan 198.806 ekor pada tahun 2013. Populasi jenis hewan ini tersebar cukup merata di berbagai kecamatan, dengan Kecamatan Todanan sebagai kecamatan yang memiliki populasi sapi potong terbanyak di Kabupaten Blora, yakni sebanyak 21.955 ekor pada tahun 2015.

Komoditas sapi potong dari Kabupaten Blora lebih banyak dipasarkan dalam keadaan hidup ke luar wilayah kabupaten tersebut, sebagian besar dikirim ke Semarang.Penawaran sapi potong dari Kabupaten Blora diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena industri sapi potong di Blora masih belum banyak dikembangkan, maka industri yang berkaitan dengan sapi potong masih berada pada level industri primer (peternakan) yang lebih tepat berada dalam penanganan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan (Dintanbunakikan) Kabupaten Blora.

**Potensi Industri Kerajinan Ukiran dan Furnitur dari Kayu (Jati)**

Salah satu sumber daya yang melimpah di wilayah Kabupaten Blora adalah sumber daya hutan, dengan luas hutan mencapai 49,66% dari total luas wilayah kabupaten tersebut (Badan Pusat Statistik, 2016). Terdapat satu jenis kayu hutan yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Blora, yakni kayu dari pohon jati. Kualitas kayu jati Blora memiliki kualitas terbaik di dunia, karena berasal dari pohon jati yang tumbuh di atas tanah yang memiliki kandungan kapur dan minyak yang tinggi.Kabupaten Blora telah dikenal sebagai salah satu kabupaten penghasil kayu jati yang cukup besar di Indonesia.Produksi Kayu Jati di Kabupaten Blora pada tahun 2014 mencapai 38.722,671 m3 (Badan Pusat Statistik, 2016).

Pohon jati merupakan pohon yang termasuk memiliki struktur kayu yang kuat dan sangat baik untuk menjaga struktur tanah, sehingga sangat baik untuk mencegah erosi.Kayu jati juga merupakan salah satu jenis kayu yang bernilai tinggi dalam industri kayu di Indonesia. Kayu jati telah dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, furnitur hingga souvenir. Pohon jati sangat cocok untuk ditanam di wilayah Kabupaten Blora, karena iklim dan suhu udaranya yang mendukung daya tumbuh pohon tersebut.Ada dugaan bahwa karena karakter tanah Blora yang berkapur dan mengandung minyak, kayu jati Blora menjadi kayu yang berkualitas tinggi dan secara alami memiliki tampilan yang berkilau.Dengan demikian pengembangan potensi hutan jati sangat menguntungkan, baik dari segi ekonomi maupun ekologi.

Kegiatan pengembangan hutan produksi kayu jati di Kabupaten Blora, selain menghasilkan manfaat ekonomi juga menghasilkan limbah eksploitasi hutan.Limbah eksploitasi hutan merupakan bagian pohon yang sebenarnya dapat dimanfaatkan, namun karena berbagai sebab terpaksa ditinggalkan di hutan. Limbah eksploitasi/pemanenan hutan dapat berupa kayu bulat yang merupakan bagian dari batang komersial, potongan pendek, akar, cabang dan ranting. Dari luas wilayah dan jumlah produksi kayu jati di kabuapaten tersebut sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa limbah eksploitasi berupa tunggak pohon jati yang ditinggalkan di Kabupaten Blora cukup melimpah.

Limbah hasil eksploitasi tersebut sebelumnya sebagian besar masih belum dimanfaatkan. Namun dalam sekitar lima tahun terakhir, limbah eksploitasi tersebut telah dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan baku industri kerajinan dan furnitur dari kayu jati. Keadaan tersebut terkait dengan kebijakan Perum Perhutani yang bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), melalui antara lain program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Peran LMDH adalah mengawasi pengambilan limbah tunggak pohon jati yang akan dimanfaatkan dan mengatur bagi hasil dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan bersama. Kebijakan Perum Perhutani dalam kerjasama dengan LMDH dikeluarkan karena pada tahun 1998-2002 terjadi penjarahan kayu besar-besaran di hutan jati milik Perhutani oleh masyarakat Kabupaten Blora.Penjarahan kayu yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar milik Perhutani tersebut merugikan Perhutani dalam jumlah besar. Sehingga Perhutani mengijinkan masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan limbah pohonnya saja, dengan syarat-syarat tertentu dan di bawah pengawasan LMDH setempat.

Selain itu, potensi limbah akar yang dihasilkan di Kabupaten Blora juga mendukung dikeluarkannya kebijakan tersebut.Pada gilirannya, pemanfaatan kembali dari limbah yang dihasilkan oleh kegiatan produksi kayu jati di hutan jati, diharapkan menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Blora dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat berupa peningkatan pendapatan dan bertambahnya lapangan kerja.

Industri kerajinan akar kayu jati mulai tumbuh dalam lima tahun terakhir, seiring dengan semakin sulitnya persediaan dan mahalnya kayu jati (tegakan). Kerajinan akar jati di Blora memiliki ciri khas bentuk yang sangat menarik dan memiliki nilai seni yang tinggi, sehingga produknya banyak diminta oleh konsumen yang berasal dari luar negeri. Selain dipasarkan di wilayah Indonesia seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Kalimantan dan Sumatera, kerajinan jati Blora juga diminati pasar internasional seperti Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, Belanda, Perancis, Jerman, Malaysia, Spanyol dan masih banyak lagi negara lainnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, industri kerajinan ukiran dan furnitur dari kayu (jati) di Blora pada tahun 2015 telah menyerap lebih dari 1.700 tenaga kerja yang tersebar di 263 perusahaan, baik yang tergabung dalam industri besar/sedang, industri kecil dan industri rumah tangga. Nilai produksi yang dihasilkan industri ini mencapai lebih dari Rp 186 miliar.Mengingat kontribusi yang dihasilkan industri ini cukup besar, setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Blora mengadakan pembinaan terhadap industri kecil dan menengah kerajinan kayu jati melalui berbagai pelatihan, bantuan peralatan dan fasilitasi pasar termasuk dukungan akses ke pasar internasional.

Industri kerajinan dan furnitur dari kayu (jati) merupakan industri yang termasuk ke dalam subsektor industri bukan migas melalui industri barang dari kayu dan hasil hutan. Dalam struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blora pada tahun 2015, sektor industri pengolahan memiliki kontribusi sebesar 11,01%. Industri barang dari kayu dan hasil hutan lainnya memiliki kontribusi yang paling besar terhadap pembentukan PDRB subsektor industri bukan migas.Hal ini disebabkan industri yang berada di Kabupaten Blora sebagian besar merupakan industri furnitur yang berbahan dasar kayu jati, mengingat kayu jati merupakan produk hasil kehutanan yang sangat potensial di kabupaten tersebut.

**Tabel 1. Perbandingan Dua Industri Unggulan Berdasarkan Beberapa Kriteria**

| **Indikator** | **Jenis Industri** |
| --- | --- |
| **Industri peternakan berbasis sapi potong** | **Industri berbasis kayu jati** |
| Kriteria Manfaat | * Populasi sapi potong yang besar sehingga berpotensi membuka lapangan kerja.
* Peternakan sapi saat ini ditangani masyarakat, sehingga manfaatnya terasa sampai ke lapis paling bawah.
* Kontribusi PDRB dalam bentuk penjualan sapi potong hidup.
 | * Memberikan kesempatan kerja yang besar.
* Pengusahaan dilakukan oleh IKM yang sudah cukup mapan dan dapat dikatakan mandiri.
* Ragam produk yang luas memungkinkan masyarakat berkreasi.
* Kontribusi PDRB secara aktual dan potensial besar.
 |
| Kriteria Keunggulan | * Prestise daerah dan keunggulan/kekhasan lokal kurang.
* Lebih ke arah peternakan,dan bukan ke industri.
 | * Prestise daerah dan keunggulan/kekhasan lokal tinggi. dengan ciri khas kemampuan pahat dan desain yang tidak dimilki oleh daerah lain, sulit ditiru, dan langka.
 |
| Kriteria Penerimaan *Stakeholder* | * *Stakeholder* umumnya memandang industri ini masih terlalu dini untuk dikembangkan di Blora.
 | * Penerimaan *stakeholder*sangat baik, karena merasa industri ini memang merupakan kebanggaan Blora (khususnyamengingat Blora sebagai penghasil kayu jati, tetapiJepara lebih dulu dikenal di bidang ukir kayu).
 |
| Kondisi Saat Ini | * Industri belum ada. Yang ada hanya peternakan sapi potong yang tidak terpusat.
 | * Industrinya sudah cukup mapan dalam skala IKM, sebagian malah dimiliki pihak asing.
 |
| Dukungan yang diperlukan | * Kebijakan yang proinvestasiterhadap industri, penciptaan iklim usaha dan iklim kerja yang sehat.
* Penyiapan infrastruktur besar-besaran, karena saat ini industri ini belum ada.
 | * Dukungan dalam aspek legalitas.
* Dukungan pasok bahan baku.
* Peningkatan kemampuan desain dan teknologi pengolahan kayu.
* Pengembangan jejaring pemasaran.
 |

*Sumber : Hasil pengumpulan data oleh Penulis*

**Industri Prioritas**

Sesuai dengan kesepakatan pendahuluan di tingkat diskusi dengan pejabat-pejabat Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Blora, ditetapkan bahwa industri yang akan diangkat untuk dibahas adalah industri berbasis sapi potong dan industri kerajinan ukiran dan furnitur dari kayu (jati). Nyaris secara aklamasi para peserta FGD bersepakat, industri yang akan dijadikan sebagai basis kompetensi inti industri Kabupaten Blora adalah industri kerajinan ukiran dan furnitur dari kayu (jati). Industri berbasis sapi potong tidak dipilih, karena ternyata para peserta FGD berpendapat selama ini Blora hanya bergiat di peternakan sapi potong dan tidak mengembangkan industrinya.

Namun demikian, tidaklah berarti bahwa proses perumusan industri prioritas berjalan dengan mudah. Istilah industri kerajinan ukiran dan furnitur dari kayu (jati) ternyata memiliki pengertian yang berbeda antara Penulis dengan peserta FGD.Dalam forum diperoleh penjelasan bahwa pengertian kayu jati adalah hanya tegakan pohon jati (batang utama pohon jati), sedangkan Penulis mengartikannya sebagai semua yang berasal dari pohon jati. Setelah memperoleh pencerahan dari forum, diperoleh kesimpulan bahwa industri prioritas di Kabupaten Blora adalah industri kerajinan dan furnitur dari kayu (jati), yaitu industri yang memiliki empat sub-industri sebagai berikut:

1. Sub-industri berbasis kayu jati (tegakan/batang utama pohon jati).

Potensi ketersediaan kayu jati di Kabupaten Blora sangat melimpah, yang ditunjukkan melalui luas hutan yang didominasi oleh pohon jati sebanyak 90.416,52 ha. Dari total luas hutan yang terdapat di kabupaten ini, sebanyak 89.411,52 ha merupakan hutan negara yang dikuasai oleh Perum Perhutani. Sedangkan sisanya adalah hutan rakyat hanya mencapai luas 1.005 ha.Jumlah produksi kayu jati bundar terbesar di kabupaten Blora pada tahun 2015, berasal dari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung yang mencapai 34.471,59 m3.Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, yakni mencapai produksi sebanyak 4.786,41 m3. Sedangkan jumlah produksi kayu jati bundar di KPH Cepu dan Blora masing-masing mencapai 17.075,25 m3pada tahun 2015 dan 7.496,87 m3 pada tahun 2014.

1. Sub-industri berbasis akar jati (bagian terbawah tegakan sampai ke bagian yang terpendam dalam tanah).

Potensi penawaran akar jati di Kabupaten Blora cukup melimpah, sejalan dengan banyaknya pohon jati yang dipanen, baik yang dilakukan Perhutani maupun masyarakat.Potensi ketersediaan akar tersebut sangat bergantung pada kecepatan Perhutani dan masyarakat dalam melakukan aktivitas penebangan/panen.

Akar jati merupakan bahan baku utama industri kerajinan ukiran dan furnitur dari kayu (jati) yang berbasis akar. Jika diasumsikan jarak tanam antarpohon jati adalah 4 meter, maka terdapat 4 pohon jati dalam luasan 16 m2.Dengan demikian, dalam luasan 1 ha terdapat kurang lebih 2.500 pohon jati. Secara riil, potensi ketersediaan input akar khususnya yang berasal dari hutan milik Perhutani, dapat diketahui setelah dua tahun. Hal ini disebabkan prosedur pascapanen yang dilakukan Perhutani, mengharuskan akar pohon jati yg sudah ditebang tidak boleh diambil akarnya dalam masa dua tahun setelah penebangan, untuk kebutuhan pencatatan lacak balak.

1. Sub-industri berbasis limbah jati (ranting berukuran kecil, sisa-sisa tebangan, sampai ke dedaunan).

 Limbah jati, khususnya dalam bentuk ranting dan sisa tebangan banyak dimanfaatkan penduduk sekitar hutan jati sebagai kayu bakar.Dalam beberapa tahun terakhir mulai timbul kesadaran bahwa limbah ini berpotensi memberikan nilai ekonomi yang tinggi dan tidak sekadar bermanfaat sebagai kayu bakar.Saat ini limbah jati sudah mulai banyak dimanfaatkan sebagai bagian dari produk furnitur dan berbagai jenis produk kerajinan.

1. Sub-industri berbasis bahan bongkaran rumah (bangunan-bangunan tua berbahan jati yang sudah tidak digunakan lagi), atau sub-industri daur-ulang jati.

 Kayu jati yang telah diolah menjadi berbagai produk bangunan (pintu, jendela, kusen, tiang rumah, dan sebagainya) setelah puluhan tahun umumnya akan dibongkar. Bahan hasil bongkaran ini sekarang banyak dimanfaatkan untuk didaur-ulang menjadi beragam produk furnitur dan kerajinan, selain juga dimanfaatkan kembali sebagai bahan bangunan.

**Gambar 1. Pohon Industri Kerajinan dan Furnitur dari Kayu (Jati)**

**SIMPULAN**

Dari seluruh analisis yang telah diuraikan, dapat diambil simpulan bahwa industri prioritas terpilih yang layak dikembangkan di Kabupaten Blora adalah industri kerajinan dan furnitur berbasis (kayu) jati.Hal tersebut sejalan dengan hasil FGD yang diikuti oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Blora yang menyepakati bahwa Industri tersebut telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.Yakni, memiliki nilai tambah tinggi, memiliki keunikan daerah, memiliki keterkaitan yang kuat dengan sumber daya yang dimiliki daerah, serta memiliki peluang menembus pasar internasional. Pengembangan industri prioritas tersebut diharapkan akan meningkatkan daya saing Kabupaten Blora.

**REKOMENDASI**

Diperlukan berbagai langkah strategis dan tindakan-tindakan nyata untuk mengangkat industri kerajinan dan furnitur berbasis (kayu) jati di Kabupaten Blora. Hal ini dilakukan agar kabupaten ini dapat berdiri setara dengan kabupaten lain (Jepara) yang sudah lebih dahulu terkenal dengan industri ukirnya. Selain itu, langkah-langkah yang akan disusun bertujuan untuk mendukung perajin jati untuk mengembangkan kemampuan dalam berkreasi dan mengelola industri ukiran dan furnitur berbasis jati. Disadari bahwa masih ada sejumlah permasalahan yang harus dihadapi meliputi berbagai aspek. Yakni, dukungan Perhutani sebagai pemasok bahan baku, baik dari segi kuantitas, kontinuitas, maupun kualitas (khususnya berkaitan dengan aspek legalitas), kemampuan sumber daya manusia lokal, akses ke pendanaan yang mudah dan murah, serta organisasi pengelola dan jejaring pemasaran

**DAFTAR PUSTAKA**

Abidin, M. Z., 2015, *Meningkatkan Daya Saing Investasi melalui Stimulus Fiskal*, Artikel Kementerian Keuangan, Tersedia pada <http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/meningkatkan-daya-saing-investasi-melalui-stimulus-fiskal>, Diakses pada tanggal 17 September 2016.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora, 2013, *Laporan Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (PSIPD) Kabupaten Blora.*

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora, 2016, *Analsis Data Blora dalam Angka.*

Badan Pusat Statistik, 2016, *Blora Dalam Angka.*

Bank Indonesia, 2009, *Penelitian Dasar Potensi Ekonomi Daerah dalam Rangka Pengembangan Komoditi Unggulan UMKMdi Wilayah Eks-Karesidenan Pati,* Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Tengah, Kantor Bank Indonesia Semarang.

Bank Indonesia, 2009, *Penelitian Dasar Potensi Ekonomi Daerah dalam Rangka Pengembangan Komoditi Unggulan UMKM di Provinsi Jawa Tengah,* Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Tengah, Kantor Bank Indonesia Semarang.

Daryanto, A. dan Hafizrianda, Y., 2010, *Analisis Input-Output dan Sosial Accounting Matrix untuk Pembangunan Ekonomi Daerah*, IPB Press, Bogor.

Hitt, M.A., Ireland, R. D., dan Hoskisson, R.E., 2001, *Manajemen Strategis, Konsep Daya Saing dan Globalisasi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Kementerian Keuangan, 2016, *Kajian atas Kebijakan Penguatan Daya Saing Daerah dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Tersedia pada <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152720-%5B_Konten_%5D-Konten%20D334.pdf>, Diakses pada tanggal 17 September 2016.

Kementerian Perindustrian, 2013, *Penyusunan Kajian Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten Blora*, tidak dipublikasikan.

Kementerian Perindustrian, 2015, *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035*, Tersedia pada <http://regulasi.kemenperin.go.id/site/baca_peraturan/1999>, Diakses pada tanggal 25 Sepetember 2016.

Prahalad, C.K. and Hamel, G., 1990, *The Core Competence of the Corporation*. Harvard Business Review, May-June.

Prahalad, C.K. and Hamel, G., 1994. *Competing for the Future*. Boston – MA: Harvard Business School Press.

**Website:**

regionalinvestment.bkpm.go.id